

Ringkasan Eksekutif

# Kami Jadi Target

**Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online**

Unduh hasil riset di <https://awaskbgo.id/ppham>

**Maret 2022**



## Latar Belakang

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi tentang Pembela Hak Asasi Manusia pada 1998 dan mengukuhkan hak-hak pembela HAM untuk dapat melaksanakan berbagai pekerjaannya, termasuk hak mendapatkan perlindungan saat menentang tindakan negara yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Tak hanya menjamin hak pembela HAM, deklarasi ini sekaligus menegaskan tugas dan peran negara untuk melindungi, memajukan dan melaksanakan HAM serta memastikan setiap orang di bawah hukum nasional dapat menikmati semua hak itu.

Kini, 23 tahun setelah adopsi deklarasi terjadi, kondisi pembela HAM secara global tampaknya tidak menjadi lebih baik. Sebaliknya, mereka tetap menjadi sasaran penyerangan dengan tren yang kian mengkhawatirkan. Salah satunya kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang membuat posisi perempuan pembela HAM semakin rentan. Ruang daring membuka pintu bagi bentuk-bentuk kekerasan baru seperti pelecehan online, doxxing, pengiriman konten seksual eksplisit hingga ancaman pemerkosaan. Komnas Perempuan sebenarnya telah memantau situasi PPHAM sejak 2007 dan mengidentifikasi adanya KBGO sebagai salah satu jenis ancaman pada 2015.

Pemanfaatan platform media sosial tidak mungkin ditinggalkan untuk mengkampanyekan isu HAM di era digital saat ini, di sisi lain, sejak beberapa tahun terakhir motivasi politik pun mulai muncul sebagai pendorong terjadinya KBGO. Dengan KBGO, perempuan pembela HAM diserang tak hanya pendapatnya, tapi juga identitasnya sebagai perempuan atau identitas gender dan seksualitas lainnya.

Belum ada data yang cukup komprehensif untuk memetakan tren bentuk-bentuk KBGO yang dialami oleh PPHAM, pola serangan, dan dampak yang ditimbulkan bagi PPHAM tersebut, baik secara personal maupun terkait aktivitasnya sebagai pembela HAM. Oleh karenanya, tim penulis beserta tim penyusun lainnya bersama SAFEnet melalui inisiatif Awasi KBGO melakukan penelitian mengenai pengalaman perempuan pembela HAM di Indonesia dalam menghadapi KBGO ini.

## Temuan

Memotret pengalaman PPHAM menghadapi tantangan dalam kerja-kerjanya, harus dipahami lebih dari sekedar kejadian individu, tetapi untuk melihat sejauh mana penindasan sistematis dan struktural terjadi karena perbedaan identitas gender dan atau karena pekerjaan yang mereka lakukan pada isu-isu terkait gender.

Penelitian ini mencoba menjabarkan beragam bentuk kekerasan berbasis gender online yang dialami perempuan pembela HAM di Indonesia secara individu, maupun dalam keorganisasian. Kekerasan yang dialami secara individu memiliki dampak terhadap organisasi tempatnya bernaung dalam melakukan kerja-kerja perlindungan HAM dan demokrasi, serta sebaliknya, pekerjaan keorganisasian juga mengancam individu perempuan pekerja HAM. Potret kekerasan terjadi pada periode 2015-2020 dengan beragam isu hak asasi manusia yang diperjuangkan, mulai dari isu feminisme, kekerasan terhadap perempuan, identitas gender, anti-korupsi, lingkungan dan agraria, hak LGBTQ, hak buruh, dan isu demokrasi, termasuk isu pelanggaran HAM di Papua.

Ada dua metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara mendalam bersama 11 narasumber dengan identitas PPHAM beragam dan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dengan 13 organisasi lembaga dan inisiatif yang berfokus kerja di antaranya pada pendampingan korban, pelayanan hukum bagi korban, feminisme, hak-hak kesehatan reproduksi dan seksualitas, hak asasi manusia, perempuan dan hak adat, serta kebebasan pers.

Jenis-jenis KBGO yang menysasar PPHAM yang ditemukan di antaranya berupa pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi/kredibilitas, pelecehan dan ancaman menuju kekerasan, ancaman dan kekerasan langsung, dan serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Sedangkan karakter KBGO yang kerap terjadi adalah adu argumen berupa *hate comment* yang belum menyerang identitas gender; lalu *trolling* berupa ungkapan bernada seksual

dan merendahkan, termasuk juga mengirimkan foto intim dengan sengaja tanpa diminta; kemudian manipulasi foto baik untuk merendahkan (misal: *meme*) atau yang bernuansa seksual (misal: dijadikan konten pornografi); ada juga yang berupa ujaran kebencian, yakni seruan dan ajakan untuk melakukan tindakan kekerasan fisik kepada korban (pemukulan, pembunuhan, pemerkosaan); dan ancaman kekerasan yang ditujukan pada korban atau keluarganya, juga berupa ancaman pemerkosaan atau ancaman pembunuhan.

Pelaku KBGO pada PPHAM yang berhasil dipetakan melalui penelitian ini di antaranya akun bodong dan buzzer politik; pihak yang tergabung dalam kelompok berbasis agama, nasionalis, dan anti-feminis; dugaan keterlibatan aparat dan korporasi; pelaku KBG yang kasusnya sedang ditangani PPHAM; serta media dan platform digital.

Dampak kekerasan berbasis gender online menyinggung berbagai aspek kehidupan, mulai dari kondisi psikologis dan fisik, sampai mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik seseorang. Dampak psikologis dan fisik yang menghambat narasumber dalam menjalani hidup sehari-hari juga turut mempengaruhi pekerjaannya. Di samping itu, dampak KBGO yang dialami sebelas PPHAM adalah swasensor, depresi dan kecemasan, dan menurunnya kualitas hidup. Dampak-dampak ini perlu dilihat secara menyeluruh dan saling mempengaruhi.

### **Rekomendasi**

Kajian ini menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi PPHAM dalam bekerja. Maka, perlindungan terintegrasi perlu memperhitungkan faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, menyelesaikan soal-soal yang menghasilkan dan mereproduksi konflik, perpindahan, ketidaksetaraan, kekerasan, hingga sikap dan praktik patriarki yang menjadi akar kekerasan berbasis gender. Jaminan berpartisipasi di ranah digital pertama-tama adalah tanggung jawab negara dalam menegakkan HAM bagi seluruh warga negara.

Dari penelitian yang telah dilakukan tim penulis, selain perlunya komitmen penegakan hukum, pembuatan regulasi yang menyeluruh dan penentuan kebijakan yang adil oleh pemerintah juga diperlukan. Kajian ini merekomendasikan untuk mendorong perlindungan terintegrasi demi mencegah dan menghapus segala bentuk tindak KBGO terhadap PPHAM dengan memastikan masing-masing PPHAM memiliki kapasitas untuk melakukan mitigasi secara personal, lingkungan kerja PPHAM membuat panduan operasional protokol keamanan dan mekanisme respons cepat, serta meminta dukungan serta menuntut tanggung jawab platform.